



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ALLAN TANDIONO

AMIN HUDAYA

LAMPIRAN
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20,00
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,00
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Level	15,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN EFEKTIF

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	108.316.946.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.166.980.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	102.523.403.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.151.620.000
TOTAL	Rp.	650.650.000

Disetujui,

Jakarta, 23 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO



AMIN HUDAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya maka penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada rancangan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (pendanaan, sumber daya manusia, dan lainnya) pada Tahun 2025 termasuk penyesuaian lingkungan strategis organisasi lainnya.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran pada Rencana Strategis dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	4
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	5
	2.1. Tujuan dan Sasaran	5
	2.2. Arah Kebijakan dan Strategi	6
	2.3. Indikator Kinerja Kegiatan	6
	2.4. Program dan Kegiatan	14
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	15
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	15
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	17
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025	22
BAB 4	: PENUTUP	25

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

LAMPIRAN B : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN C : Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya serta beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perubahan lingkungan strategis

diantaranya kebijakan efisiensi anggaran belanja yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025.

Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, revisi target kinerja serta perubahan alokasi anggaran dan rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan perubahan/penyesuaian target kinerja terhadap sasaran dari program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi

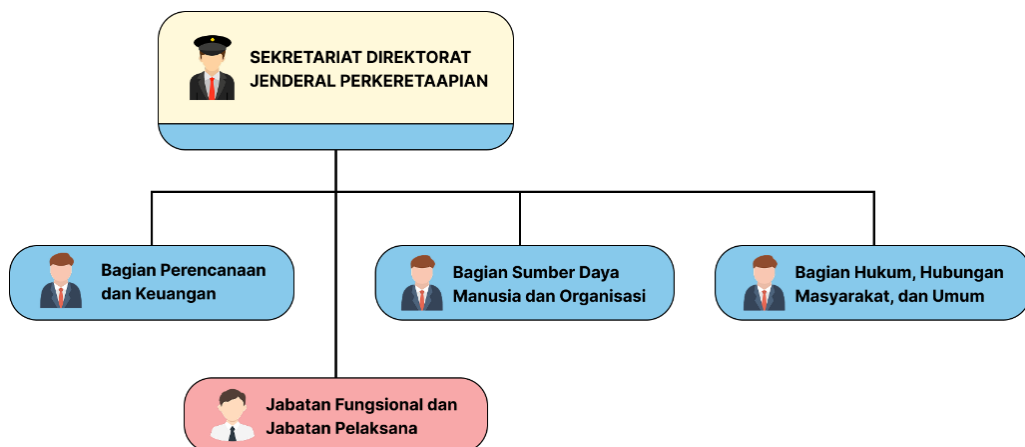
kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
7. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan fungsional atau Jabatan Pelaksana.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan bulan Juni 2025 adalah sebanyak 152 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai*
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	69
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	31
3	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	52
Jumlah		152

**) Termasuk tenaga kerja perbantuan dengan rincian:*

- *Bagian Perencanaan dan Keuangan perbantuan sebanyak 5 orang;*
- *Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum perbantuan sebanyak 4 orang;*
- *Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi perbantuan sebanyak 3 orang.*

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki misi sebagai berikut:

1. mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju; dan
2. mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai representasi dari visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hendak dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sebagai berikut:

1. terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional (SN);
2. terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
3. terwujudnya kebijakan transportasi perkeretaapian yang berkualitas; dan
4. terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada rancangan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 termasuk *cascading* sasaran program, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan mampu berperan sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun sasaran kegiatan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan:

1. terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
2. tersedianya SDM regulator perkeretaapian yang kompeten dan profesional;
3. tersedianya pengelolaan data dan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal;
4. terwujudnya dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
5. terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan pengendalian yang memadai;
6. meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya anggaran dan aset Pemerintah; dan
7. meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1. melakukan perbaikan tata laksana;
2. pemenuhan standar mutu dalam penyusunan kebijakan;
3. melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran; dan
5. melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi pada rancangan Rencana Strategis, telah direviu dan *diupdate* konsep Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai tolok ukur keberhasilan dengan memperhatikan penyesuaian organisasi dan hasil evaluasi pada Triwulan I 2025 sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 2-1 Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis
Tahun 2025-2029 (Update)**

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan Semula	Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi	Keterangan
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian (%)	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian (%)	Tetap
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti (%)		Pada Tahun 2025 dan rancangan Renstra 2025-2029, kegiatan dan anggaran Setditjen Perkeretaapian hanya mencakup Program Dukungan Manajemen dimana tidak terdapat Program Infrastruktur Konektivitas. Untuk itu, tidak terdapat kegiatan pendukung untuk rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian (studi kelayakan, <i>masterplan</i> , dll).
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN (Nilai)	Indeks Profesional ASN (Nilai)	Tetap
Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Terdapat perubahan tata cara perhitungan mengacu kebijakan model indikator evaluasi kinerja pemerintah digital (pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir)
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	Tetap

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan Semula	Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi	Keterangan
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian (%)	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian (%)	Tetap
	Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian (Nilai)		Pengelolaan aset di lingkungan Setditjen Perkeretaapian mayoritas <i>outcome</i> mendukung perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian, sehingga kegiatan pendukung digabungkan pada Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBP
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian (Nilai)	Tetap

Tabel 2-2 Target Kinerja Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (Update)

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	e	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	84,00	84,50	85,00	86,00
	f	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00
	g	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	i	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20	90,00	91,00	92,00	93,00
	k	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis $\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Jumlah Target Legislasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Profesional ASN	Merupakan parameter untuk mengukur Profesional ASN yang meliputi tingkat Pendidikan, kompetensi (Diklat/ seminar/ workshop/ sejenisnya), kinerja dan disiplin	Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi • 81 – 90: Kategori Tinggi • 71 – 80: Kategori Sedang • 61 – 70: Kategori Rendah • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) atau reliabilitas dari pengelolaan data dan teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 mengacu model indikator evaluasi kinerja pemerintah digital dengan pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indeks pemerintah digital, khususnya pada indikator 33-35). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah; • Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital; • Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital.	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim APIP/Tim Evaluasi Internal terhadap Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan IKP Setjen Kemenhub serta selaras dengan Tugas dan Fungsi serta <i>Core Business</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko skala 0-30 dengan kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan. $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada **Program Dukungan Manajemen** dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolok ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dokumen rancangan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Rp. 193.421.222.000 (alokasi anggaran Tahun 2025);
2. Tahun 2026: Rp. 193.262.466.000;
3. Tahun 2027: Rp. 203.269.714.000;
4. Tahun 2028: Rp. 213.402.869.000; dan
5. Tahun 2029: Rp. 224.271.979.000.

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada rancangan Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 dan Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. Adapun tata cara pengukuran indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	Jumlah capaian regulasi/legislasi periode Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah kebutuhan regulasi/legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis: $\frac{\text{Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$
2	Indeks Profesional ASN	Nilai	Tata cara perhitungan dengan skala 0-100 mengacu pada Peraturan MENPANRB 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN.
3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian dengan indeks skala 1-5 mengacu model indikator evaluasi kinerja pemerintah digital (indeks pemerintah digital, khususnya pada indikator 33-35) dengan penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah; • Tingkat Pemenuhan Kualitas Layanan Digital; • Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 mengacu pada pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
5	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (skala 0-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I.
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko dengan skala 0-30 kategori Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	%	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keseluruhan temuan auditor internal.
8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang.
9	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian unit kerja Setditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan.
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-100) diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada rancangan Rencana Strategis, memperhatikan capaian periode sebelumnya dan perkembangan kebijakan, organisasi, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025. Adapun revisi target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rancangan Renstra 2025	Baseline 2024	Realisasi TW I 2025	Target PK 2025 Semula	Target PK 2025 Revisi	Keterangan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	20,00 (5 peraturan/legislasi)	108,89 (kumulatif 2020-2024)	0,00	20,00	20,00	- Beberapa rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang berproses sampai dengan Triwulan I 2025 diantaranya: - Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; - Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; - Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; - Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; - Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA. Target tetap, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi sesuai hasil monitoring Triwulan I 2025.
2	Indeks Profesional ASN	Nilai	89,000	88,490	-	89,000	89,000	Berdasarkan monitoring Triwulan I 2025, nilai sementara sebesar 64,36 serta masih dalam tahap peningkatan nilai indeks profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya dengan pemutakhiran data melalui aplikasi SIASN BKN dan SIK Kemenhub.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rancangan Renstra 2025	Baseline 2024	Realisasi TW I 2025	Target PK 2025 Semula	Target PK 2025 Revisi	Keterangan
								• Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>.
3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,00	-	-	3,00	3,00	• Pelaksanaan penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan SPBE di tingkat Kementerian Perhubungan ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2025. • Target tetap, terdapat perubahan tata cara perhitungan mengacu kebijakan model indikator evaluasi kinerja pemerintah digital (indeks pemerintah digital)
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	Nilai	90,00	90,00	-	90,00	90,00	• Penilaian mengacu pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dimana penilaian direncanakan terpenuhi Triwulan IV 2025. • Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>.
5	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,35	-	83,65	83,65	• Penilaian terlaksana pada Triwulan II-III oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penilaian mandiri dan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. • Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai	15,000	-	-	15,00	15,00	• Penilaian mandiri telah dilaksanakan pada Triwulan I 2025, sedangkan penilaian oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian masih berproses. • Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rancangan Renstra 2025	Baseline 2024	Realisasi TW I 2025	Target PK 2025 Semula	Target PK 2025 Revisi	Keterangan
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	81,00	80,61	82,33	81,00	81,00	- Realisasi/data sementara tindak lanjut atas temuan auditor pada Triwulan I 2025 sebesar 82,33% dari jumlah temuan sebanyak 498 temuan. Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>.
8	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	85,00	84,07	50,00	85,00	85,00	- Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan penjumlahan dari 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Target tetap, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi sesuai hasil monitoring Triwulan I 2025.
9	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	100,00	100,00	1,13	100,00	100,00	- Realisasi PNBPN Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan I 2025 sebesar 1,127% dari target Tahun 2025 sebesar Rp17.500.000.000,-. Target tetap, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi sesuai hasil monitoring Triwulan I 2025.
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai	89,20	89,16	-	89,20	89,20	- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-100) mengacu Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 92 Tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2025. - Pelaksanaan penilaian oleh Setjen Kementerian Perhubungan cq. Biro Umum. Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i>.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Rancangan Renstra 2025	Baseline 2024	Realisasi TW I 2025	Target PK 2025 Semula	Target PK 2025 Revisi	Keterangan
11	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,71 (<i>update baseline</i>)	3,87	3,89	3,89	- Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum. Target tetap, monitoring Triwulan I 2025 masih <i>on the right track</i> dan kedepan akan fokus pada layanan perkantoran untuk unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.

3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi Minggu I Juni 2025 secara total pagu tidak mengalami perubahan. Namun pada pelaksanaannya, terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja (pemblokiran anggaran) yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran serta efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00, yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan sejumlah kegiatan kontraktual sebagai bagian dari program dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian yang dapat dimanfaatkan (anggaran efektif) sebesar Rp108.316.946.000,00.

Tabel 3-3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi (Rp)
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	10.213.903.000	10.213.903.000	1.166.980.000
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	159.006.060.000	159.006.060.000	102.523.403.000
3.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.952.563.000	12.952.563.000	1.151.620.000

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi (Rp)
5.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.166.058.000	2.166.058.000	650.650.000
Jumlah		193.421.222.000	193.421.222.000	108.316.946.000

Adapun pada periode Januari – Mei 2025 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali revisi anggaran dan revisi anggaran tersebut tidak mengubah pagu total namun berpengaruh terhadap komposisi alokasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Perkeretaapian sebagaimana rincian pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Rincian Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	a	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	20,00	10.053.473.000	10.053.473.000	2.671.433.000
Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	b	Indeks Profesional ASN	89,00	11.685.776.000	11.705.776.000	877.500.000
Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	c	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	3,00	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	d	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,00	12.952.563.000	12.952.563.000	1.151.620.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan	e	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	83,65	13.221.160.000	13.221.160.000	1.780.018.000
	f	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	15,00	2.893.665.000	2.893.665.000	427.807.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
Pengendalian yang Memadai	g	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	81,00	365.992.000	365.992.000	159.954.000
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	h	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	85,00	13.132.267.000	13.153.867.000	7.328.799.000
	i	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	100,00			
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	j	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	89,20	1.043.112.000	1.071.472.000	290.848.000
	k	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,89	118.990.576.000	118.920.616.000	90.804.674.000
Jumlah				193.421.222.000	193.421.222.000	108.316.946.000

BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 meliputi Program Dukungan Manajemen sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja menetapkan penyesuaian/perubahan target masing-masing indikator kinerja kegiatan guna selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislati (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%
2	Tersedianya SDM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Indeks Profesional ASN	Nilai
3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian	Nilai
4	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai
5	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Aset Pemerintah	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Realsiasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, 23 Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SK 1	Tertelaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.063.473.000	2.671.433.000	
IKK 1	Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)	-	-	-	-	-	-	-	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	10.063.473.000	2.671.433.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan
1)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.236.672.000	450.100.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	309.218.000	309.218.000	309.218.000	618.436.000	618.436.000	1.051.341.200	1.051.341.200	1.113.184.800	1.236.672.000		
		-	22.505.000	22.505.000	22.505.000	45.010.000	67.515.000	112.525.000	225.050.000	342.585.000	342.585.000	405.090.000	450.100.000			
		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	85%	85%	90%	100%			
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	50%	85%	85%	90%	100%			
2)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	53.258.750	53.258.750	53.258.750	106.513.500	106.513.500	181.072.950	181.072.950	181.734.300	213.027.000	300.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	53.258.750	53.258.750	53.258.750	106.513.500	106.513.500	181.072.950	181.072.950	181.734.300	213.027.000		
		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	57.923.850	57.923.850	57.923.850	115.847.700	115.847.700	193.412.850	193.412.850	193.412.850	229.695.000	200.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	57.923.850	57.923.850	57.923.850	115.847.700	115.847.700	193.412.850	193.412.850	193.412.850	229.695.000		
		0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	30%	60%	60%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
4)	Penyusunan Pendapat Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum (Legal Opinion)	-	-	-	-	82.500.000	82.500.000	82.500.000	165.000.000	165.000.000	292.500.000	292.500.000	292.500.000	330.000.000	200.050.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	82.500.000	82.500.000	82.500.000	165.000.000	165.000.000	292.500.000	292.500.000	292.500.000	330.000.000		
		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
5)	Pengelolaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	-	-	-	-	459.353.750	459.353.750	459.353.750	918.707.500	918.707.500	1.591.802.250	1.591.802.250	1.637.815.000	1.837.415.000	450.300.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	459.353.750	459.353.750	459.353.750	918.707.500	918.707.500	1.591.802.250	1.591.802.250	1.637.815.000	1.837.415.000		
		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
6)	Penyusunan kajian/kebijakan	-	-	-	-	1.512.500.000	1.512.500.000	1.512.500.000	3.025.000.000	3.025.000.000	5.142.500.000	5.142.500.000	5.445.000.000	6.050.000.000	1.570.483.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	1.512.500.000	1.512.500.000	1.512.500.000	3.025.000.000	3.025.000.000	5.142.500.000	5.142.500.000	5.445.000.000	6.050.000.000		
		0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
SK 2	Tersedianya SOM Regulator Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.706.776.000	877.600.000	
IKK 2	Indeks Profesional ASN (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,000	11.706.776.000	877.600.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pelebaran dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Dijen Perkeretaapian	-	-	-	-	27.405.000	27.405.000	27.405.000	54.810.000	54.810.000	92.355.000	92.355.000	92.355.000	182.700.000	93.400.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	27.405.000	27.405.000	27.405.000	54.810.000	54.810.000	92.355.000	92.355.000	92.355.000	182.700.000		
		0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	30%	60%	60%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
2)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	37.500.000	37.500.000	37.500.000	75.000.000	75.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	37.500.000	37.500.000	37.500.000	75.000.000	75.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	250.000.000		
		0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
3)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	30.565.800	30.565.800	30.565.800	61.131.600	61.131.600	102.552.600	102.552.600	102.552.600	205.105.200	33.850.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	30.565.800	30.565.800	30.565.800	61.131.600	61.131.600	102.552.600	102.552.600	102.552.600	205.105.200		
		0%	11%	11%	11%	24%	24%	24%	33%	33%	55%	55%	100%			
		0%	0%	0%	0%	1%	1%	1%	3%	3%	7%	7%	100%			
4)	Character Building Pegawai DJKA	-	-	-	-	270.231.072	270.231.072	270.231.072	540.462.144	540.462.144	900.924.288	900.924.288	900.924.288	1.801.848.576	250.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	270.231.072	270.231.072	270.231.072	540.462.144	540.462.144	900.924.288	900.924.288	900.924.288	1.801.848.576		
		0%	11%	11%	11%	32%	32%	32%	55%	55%	75%	75%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
SK 3	Tersedianya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.092.838.000	2.824.293.000	
IKK 3	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Dijen Perkeretaapian (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	9.092.838.000	2.824.293.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1)	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	544.621.600	544.621.600	544.621.600	1.089.243.200	1.089.243.200	1.815.405.600	1.815.405.600	1.815.405.600	3.630.811.200	187.293.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	544.621.600	544.621.600	544.621.600	1.089.243.200	1.089.243.200	1.815.405.600	1.815.405.600	1.815.405.600	3.630.811.200		
		0%	20%	20%	20%	35%	35%	35%	50%	50%	70%	70%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	900.229.350	900.229.350	900.229.350	1.800.458.700	1.800.458.700	3.600.917.400	3.600.917.400	3.600.917.400	7.201.834.800	2.637.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	900.229.350	900.229.350	900.229.350	1.800.458.700	1.800.458.700	3.600.917.400	3.600.917.400	3.600.917.400	7.201.834.800		
		0%	0%	0%	0%	15%	15%	15%	30%	30%	50%	50%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	89.400.000	89.400.000	89.400.000	178.800.000	178.800.000	297.600.000	297.600.000	297.600.000	595.200.000	299.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	89.400.000	89.400.000	89.400.000	178.800.000	178.800.000	297.600.000	297.600.000	297.600.000	595.200.000		
		0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	50%	50%	70%	70%	100%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%			

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%			
6)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-undangan, Penyelesaian dan Kehumasan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	854.985.000	293.388.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
7)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	628.504.000	248.641.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
8)	Pembinaan Pengelolaan Bata/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	419.654.000	193.099.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
BOK 9	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setidjen Perkeretaapian (%)	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%	6.750.587.000	5.382.378.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
1)	Pengumpulan PNBP yang berkaitan dengan Tindakan dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	273.138.000	134.287.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	72.672.000	33.210.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
3)	Penjualan Lapangan Pemertanatan Barang Milik Negara pada Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	252.429.000	105.718.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	184.369.000	79.087.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.526.244.000	4.733.206.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
6)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	441.705.000	196.771.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian													119.992.088.000	81.096.822.000	
BOK 12	Nilai Pengawasan Keangsan Internal Setidjen Perkeretaapian (Nilai)												89,200	1.671.472.000	296.848.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1)	Pengelolaan Anasir di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	388.989.000	129.643.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2)	Peningkatan Kompetensi Anasir	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	332.418.000	250.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
3)	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Pemutakhiran BMN Perkeretaapian DUKA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	350.065.000	160.995.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
BOK 13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkeretaapian Setidjen Perkeretaapian (Nilai)	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	118.920.816.000	80.804.674.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkeretaapian di Lingkungan Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	447.541.000	38.637.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
2)	Penjagaan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Dijen Perkeretaapian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	908.790.000	446.695.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
3)	Monitoring Ketidaksihaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	282.056.000	50.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
4)	Pembinaan Keptidaksihaan dan MC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	182.671.000	71.000.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
5)	Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Ketidaksihaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	239.569.000	200.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

KODE	BASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												ANGGARAN TOTAL REVISI PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI PK (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
6)	Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Dinas Pengendalian Umum serta Kerumahaan	31.743.200	63.426.400	95.139.600	126.852.800	158.566.000	190.279.200	221.992.400	253.705.600	285.418.800	317.132.000	348.845.200	380.558.400	396.415.000	396.415.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
7)	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Penawaran Berkala Mesin Absensi pada UPT/Basis/Satker Perkeretaapian	28.670.400	57.340.800	86.011.200	114.681.600	143.352.000	172.022.400	200.692.800	229.363.200	258.033.600	286.704.000	315.374.400	344.044.800	358.361.000	358.361.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
8)	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	47.970.100	94.140.200	141.210.300	187.280.400	233.350.500	279.420.600	325.490.700	371.560.800	417.630.900	463.701.000	509.771.100	555.841.200	568.377.000	568.377.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
9)	Renovasi gedung dan bangunan	454.742.300	909.484.600	1.364.226.900	1.818.969.200	2.273.711.500	2.728.453.800	3.183.196.100	3.637.938.400	4.092.680.700	4.547.423.000	5.002.165.300	5.456.907.600	5.809.279.000	5.809.279.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
10)	Gaji dan Tunjangan	5.580.358.000	11.160.716.000	16.741.074.000	22.321.432.000	27.901.790.000	33.482.148.000	39.062.506.000	44.642.864.000	50.223.222.000	55.803.580.000	61.383.938.000	66.964.296.000	69.754.600.000	69.754.600.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
11)	Bimbingan Teknis Kerumahaan dan Umum	35.240.560	70.481.120	105.721.680	140.962.240	176.202.800	211.443.360	246.683.920	281.924.480	317.165.040	352.405.600	387.646.160	422.886.720	440.517.000	440.517.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
12)	Kendaraan Bermotor	748.621.920	1.497.243.840	2.245.865.760	2.994.487.680	3.743.109.600	4.491.731.520	5.240.353.440	5.988.975.360	6.737.597.280	7.486.219.200	8.234.841.120	8.983.463.040	9.310.274.000	9.310.274.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
13)	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	69.786.000	139.572.000	209.358.000	279.144.000	348.930.000	418.716.000	488.502.000	558.288.000	628.074.000	697.860.000	767.646.000	837.432.000	872.325.000	872.325.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
14)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.340.338.800	4.680.677.600	7.020.916.400	9.361.255.200	11.701.594.000	14.041.932.800	16.382.271.600	18.722.610.400	21.062.949.200	23.403.288.000	25.743.626.800	28.083.965.600	29.324.311.000	29.324.311.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		0%	0%	0%	0%	12%	20%	30%	50%	63%	75%	86%	100%			
		17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%			
		193.421.222.000	386.842.444.000	580.263.666.000	773.684.888.000	967.106.110.000	1.160.527.332.000	1.353.948.554.000	1.547.369.776.000	1.740.790.998.000	1.934.212.220.000	2.127.633.442.000	2.321.054.664.000	2.414.511.000.000	2.414.511.000.000	

Jakarta, Juni 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003